

**PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA
SURABAYA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
KERJASAMA DENGAN PIHAK KEDUA**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
ANANDA PUTRA AGUNG SETIADI
NPM : 22300079**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
TAHUN 2025**

**PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA
SURABAYA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
KERJASAMA DENGAN PIHAK KEDUA
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**Disusun Oleh :
ANANDA PUTRA AGUNG SETIADI
NPM : 22300079**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
TAHUN 2025**

**PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA
SURABAYA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
KERJASAMA DENGAN PIHAK KEDUA
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

ANANDA PUTRA AGUNG SETIADI

NPM: 22300079

SURABAYA, 13 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv.

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.

**PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA
SURABAYA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
KERJASAMA DENGAN PIHAK KEDUA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH

ANANDA PUTRA AGUNG SETIADI

NPM: 22300079

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL 13 JANUARI 2026 DAN DINYATAKAN TELAH
MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

1. Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. (Ketua)

1.



2. Dr. Desy Nurkristia Tedjawati S.H., M.Kn. (Anggota)

2.



3. Dr. Ardhiwinda Kusumaputra S.H., M.H. (Anggota)

3.



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan puji dan terima kasih ke hadirat tuhan yang maha esa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada universitas wijaya kusuma surabaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku rektor universitas wijaya kusuma surabaya atas kepemimpinan dan fasilitas akademik yang memungkinkan proses studi berjalan dengan lancar.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H selaku dekan fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya, atas arahannya yang selalu mendukung perkembangan akademik mahasiswa.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku ketua program studi fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya, yang telah memberikan bimbingan, kemudahan administrasi, serta dorongan selama penyusunan skripsi.
4. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H. Atas kesabaran, waktu, serta arahan yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya.

6. Kepada tata usaha beserta jajarannya di fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama ini.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang saya cintai , yang selalu mendoakan saya,memberikan dukungan dan doa selama perkuliahan saya ssehingga dapat berjalan dengan lancar hingga saat ini
8. Terima kasih kepada teman SMP saya, Gundala Dwiyala, Mirza Zikhulhaq, Amalia Eki, Dyah Lestari, Aisyah Putri, Novia Nirmala, Lailathus Saadah, Ailiyah Hanum, Sinta Radhini sudah menyemangati saya untuk cepat lulus.
9. Kepada teman-teman saya Farel Alif, Hamka Oryza, Wildan Fauzi, Yuniar Annisa, Novensya Clarabella yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
10. Terimakasih kepada Indah Firdausy yang selalu sabar menemani saya selama proses pembuatan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik.

Surabaya, 8 desember 2025

Yang menyatakan

(Ananda Putra Agung Setiadi)

Npm: 22300079

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Putra Agung Setiadi
NPM : 22300079
Alamat : Jl. Tenggumung Karya Lor 12 No 5 Surabaya
No. Telp (HP) : 08976882080

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA SURABAYA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KERJASAMA DENGAN PIHAK KEDUA ”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur plagiarisme atau autoplagiarisme dalam karya ini, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi akademik yang diberlakukan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 5 Januari 2026

Yang menyatakan


(Ananda Putra Agung Setiadi)

NPM : 22300079

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan parkir tepi jalan umum (TJU) di Kota Surabaya serta implementasi kerja sama pengelolaannya dengan pihak kedua dalam perspektif hukum administrasi negara. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga kebutuhan ruang parkir meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti parkir liar, kemacetan lalu lintas, konflik penggunaan ruang jalan, serta kebocoran penerimaan daerah akibat pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Parkir, dalam konteks ini, tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis transportasi, melainkan juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang menuntut kepastian hukum, keteraturan, dan akuntabilitas. Secara normatif, pengaturan parkir di Kota Surabaya berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan perparkiran. Di tingkat daerah, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, guna menganalisis kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pengelolaan parkir TJU, serta pola kerja sama dengan pihak kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola parkir tepi jalan umum, termasuk melalui kerja sama dengan pihak kedua sebagai bentuk kemitraan dalam pelayanan publik. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah daerah dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan parkir. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait konsistensi penegakan hukum, transparansi pengelolaan retribusi, serta kepatuhan masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya pada dasarnya telah memadai secara normatif, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek implementasi. Kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak kedua perlu dirancang secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemanfaatan publik agar mampu mewujudkan ketertiban lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan parkir, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Kata kunci: parkir tepi jalan umum, kewenangan pemerintah daerah, kerja sama pihak kedua, hukum administrasi negara, Kota Surabaya.

Abstract

This study examines the regulation of public roadside parking (TJU) in the city of Surabaya and the implementation of management cooperation with third parties from the perspective of state administrative law. Surabaya, as a metropolitan city with a high level of mobility, has significantly increased the need for parking space. This condition gives rise to various problems, such as illegal parking, traffic congestion, conflicts over the use of road space, and leakage of regional revenue due to parking fees that do not comply with regulations. Parking, in this context, is not only understood as a technical transportation issue, but also as part of public services that require legal certainty, order, and accountability. Normatively, parking regulations in the city of Surabaya are based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which grants the authority to local governments to regulate parking implementation. At the regional level, these provisions are further elaborated in Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Implementation. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach to analyze local government authority, the management mechanisms for public roadside parking, and patterns of cooperation with third parties.

The results indicate that, legally, the Surabaya City Government has sufficient authority to manage public roadside parking, including through collaboration with third parties as a form of partnership in public services. This collaboration aims to address limited local government resources and improve the efficiency and quality of parking services. However, in its implementation, gaps remain between legal norms and field practice, particularly regarding consistency of law enforcement, transparency of retribution management, and public compliance.

This study concludes that the legal regulations for public roadside parking in Surabaya are essentially adequate from a normative perspective, but still require improvement in implementation. Parking management collaboration with third parties needs to be designed in a transparent, accountable, and public benefit-oriented manner to ensure orderly traffic flow, improve the quality of parking services, and support good local governance.

Keywords: *public roadside parking, local government authority, second-party collaboration, state administrative law, Surabaya City.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	7
1.5.1 Konsep Parkir.....	7
1.5.2 Kewenangan.....	9
1.5.3 Kerjasama Dalam Perspektif Hukum.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian.....	12
1.6.2 Bahan Hukum.....	14
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENGATURAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM (TJU)	
DI KOTA SURABAYA.....	18
2.1 Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya.....	18

2.2 Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya.....	26
BAB III BAGAIMANA PENGATURAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DENGAN PIHAK KEDUA DI KOTA SURABAYA YANG BERKEMANFAATAN.....	39
3.1 Pengaturan Kerjasama Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dengan Badan Usaha, Dengan Sistem Bagi Hasil di Kota Surabaya.....	39
3.2 Implementasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dengan Pihak Kedua Yang Berkemanfaatan.....	48
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	59
DAFTAR BACAAN.....	61